

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemukiman adalah bagian yang sangat esensial dalam kehidupan manusia untuk mendukung keberlangsungan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Pemukiman merupakan sebuah sistem yang terdiri dari susunan struktur ruang yang dihuni dan dikelola oleh manusia untuk memperoleh kebutuhan hidup, baik secara fisik ataupun sosial. Kebutuhan hidup manusia dalam pemukiman tidak hanya dipandang sebagai fisik, akan tetapi mencakup unsur non fisik, karena pemukiman manusia meliputi semua kehidupan dalam struktur ruang yang mencakup ikatan antar manusia, masyarakat, sosial ekonomi, budaya dan alam (Doxiadis, 1968). Meningkatnya jumlah penduduk dalam pemukiman menjadi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama pada pemukiman perkotaan, hal ini disebabkan oleh terkonsentrasinya perkembangan penduduk dari desa ke kota yang disebut dengan urbanisasi, dalam proses urbanisasi tentunya masyarakat tidak sebatas berpindah secara fisik, akan tetapi masyarakat pindah dengan sosial dan ekonomi mereka sebelumnya yang kemudian akan melahirkan pemukiman dengan mencerminkan diri mereka (Turner, 1968).

Urbanisasi bukan hanya berdampak pada pertumbuhan kota, namun juga akan mengubah beberapa aspek seperti karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan pemukiman (Firman, T. 2010). Perkembangan penduduk yang tinggi dan tidak disesuaikan dengan penyediaan lahan dan hunian yang layak untuk seluruh lapisan masyarakat membuat masyarakat terkendala dalam mengakses hunian formal. Mereka yang memiliki ekonomi rendah mereka tidak memilih tempat tinggal, akan tetapi mereka bermukim di mana mereka bisa (Turner, 1976).

Preferensi masyarakat dalam bermukim memiliki sudut pandang berbeda yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang kemudian menjadi penentu dalam menentukan tempat tinggal. Tunner (1976) menyebutkan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendirikan tempat tinggal dalam tuntutan yang mendesak, tanpa memikirkan standar legalitas atau teknik, maka akan

menyebabkan berkembangnya pemukiman yang tidak layak dan tidak dapat dikendalikan. Hal ini menyebabkan awal mula timbulnya fenomena pemukiman kumuh dalam pemukiman perkotaan. Pemukiman kumuh ini bisa didapati hampir di seluruh pemukiman perkotaan di seluruh Indonesia terlebih pada pusat Ibu Kota Provinsi. Di Indonesia pemukiman kumuh berkembang di beberapa wilayah marginal seperti tempat terlarang, rel kereta api, tanah ilegal dan pinggiran kota, yang membentuk kelompok sosial dengan sistem yang khas.

Walaupun secara fisik tidak layak untuk di huni, namun pada banyaknya kasus kawasan kumuh yang tetap dihuni bahkan berkembang sebagai tempat bermukim dan menjadi pilihan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini mengungkapkan bahwa sekalipun memiliki kondisi fisik yang buruk, kawasan tersebut menyimpan nilai guna yang sangat tinggi bagi penghuninya. Nilai guna ini berhubungan erat dengan kapabilitas ruang huni dan lingkungan pemukiman untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti fleksibilitas dalam pemanfaatan ruang, dekatnya dengan sumber ekonomi masyarakat, terjangkau biaya hunian, serta eratnya jaringan sosial masyarakat

Berdasarkan fungsional pemukiman kumuh mempunyai nilai guna sosial ekonomi yang sangat bermakna dan tinggi. Hunian tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk bertinggal, akan tetapi juga dijadikan sebagai tempat usaha, ruang untuk interaksi sosial dan tempat produksi. Pengelolaan ruang yang timbul secara alami memperlihatkan adanya logika ruang yang berkembang dari kebutuhan harian dan interaksi sosial antar masyarakat.

Kota Banda Aceh dikenal sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh merupakan sebuah pusat kota yang memiliki sosial ekonomi tinggi yang berperan strategis bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Banda Aceh juga belum terlepas dari permasalahan wilayah kumuh. Berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh nomor 372 tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh Kota Banda Aceh, terdapat 20 lokasi pemukiman kumuh yang tersebar di 7 kecamatan dengan total luas area mencapai 797,56 hektar, yang terbagi menjadi 7 lokasi dengan tingkat kekumuhan sedang, dan 13 lokasi dengan tingkat kekumuhan ringan. Lokasi dengan tingkat kekumuhan terbesar dialami oleh

Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil terbaru pengamatan dan observasi di lapangan permukiman kumuh Gampong Jawa mencapai 10.58 Ha.

Selain dikenal sebagai pemukiman kumuh, Gampong ini memiliki karakteristik pemukiman yang unik, dibalik geografis yang terletak di kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, Gampong Jawa juga dikenal sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kota Banda Aceh, hal ini berdampak langsung pada pemukiman Gampong Jawa. Kehadiran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Gampong Jawa Kota Banda Aceh menimbulkan berbagai permasalahan dalam pemukiman, salah satunya adalah terkontaminasi lingkungan pemukiman dengan limbah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menjadikan salah satu faktor pemukiman tersebut menjadi kumuh.

Gampong Jawa Kota Banda Aceh memiliki wilayah pemukiman seluas 150,60 Ha yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka sebelah utara, Peulanggahan sebelah selatan, Krueng Aceh sebelah timur, serta Gampong Pande di sebelah barat. Pemukiman Gampong Jawa dihuni oleh berbagai golongan masyarakat yang terdiri dari masyarakat tradisional dan pendatang, hal ini disebabkan oleh warga yang berasal dari berbagai latar belakang, dan hampir setengah dari penduduknya bukan merupakan penduduk asli. Mereka berasal dari pendatang yang merupakan kaum urbanisasi. Masyarakat memilih untuk menetap di Gampong Jawa karena beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam menentukan tempat tinggal adalah keterjangkauan harga yang sesuai dengan ekonomi masyarakat (BPS Aceh, 2020). Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk pada pemukiman Gampong Jawa sangat pesat, yang mengakibatkan tingkat kebutuhan akan hunian semakin meningkat hingga menyebabkan permintaan perumahan terus bertambah.

Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, mereka yang bermukim banyak bekerja di sektor informal memanfaatkan kondisi finansial yang terbatas dengan mendirikan hunian yang berdekatan dengan tempat kerja mereka karena memiliki prinsip yaitu “bekerja untuk makan”. Masyarakat mendirikan hunian dengan memanfaatkan lahan kosong untuk membangun rumah, kebanyakan dari mereka

menyewa tanah untuk mendirikan hunian dengan seadanya. Hal ini menyebabkan lahirnya hunian yang bervariasi.

Dalam bermukim Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memanfaatkan hunian dengan adaptif dan fungsional mengikuti kebutuhan dan aktivitas mereka sehari-hari. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hunian tidak hanya diartikan sebagai ruang statis akan tetapi di pahami sebagai ruang yang dinamis, fleksibel, multifungsi, dan selalu berubah - ubah yang di sesuaikan sejalan dengan kebutuhan sehari-hari penghuninya. Masyarakat menjadikan rumah sebagai wadah untuk bekerja memilah barang hasil memulung, menjadikan teras sebagai warung untuk berdagang, dan ada yang menjadikan hunian sebagai wadah untuk menciptakan produk umkm. Hal ini menunjuki bahwa sekalipun secara fisik terbatas dan tidak layak untuk di huni akan tetapi kawasan ini memiliki nilai guna yang tinggi dalam mendukung dan menopang kehidupan sehari-hari masyarakat.

Nilai guna pada Gampong Jawa tidak hanya terlihat dari efisiensi penggunaan ruang, tetapi juga dari fungsi dan makna sosial yang tampak melalui aktivitas sehari-hari. Ruang - ruang berfungsi sebagai tempat eksistensi, wadah masyarakat memperjelas identitas dan interaksi sosial. Oleh karena itu, kawasan ini merupakan representasi yang nyata dari arsitektur yang hidup dan berkembang dari karakter dan pengalaman manusia, tidak dengan desain formal semata.

Dalam arsitektur karakteristik dan perilaku merupakan faktor yang sangat menentukan masyarakat dalam bertinggal dan memanfaatkan ruang untuk di huni. Perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan kebutuhan sehari-hari akan memengaruhi cara masyarakat menilai dan menggunakan ruang hunian yang membentuk nilai guna dari sebuah pemukiman. Turner (1968) menjelaskan bahwa terdapat 3 karakter yang menentukan perilaku masyarakat di perkotaan dalam memilih tempat tinggal yaitu *bridgeheaders*, *consolidators* dan *status seekers* .

Berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan bahwa pemukiman kumuh tidak hanya dipandang sebagai masalah secara fisik karena kondisi bangunan yang tidak layak, akan tetapi fenomena ini terjadi karena ingin menunjukkan bahwa meskipun kondisi fisiknya buruk, kawasan tersebut memiliki nilai guna yang tinggi

bagi penghuninya. Kajian berdasarkan nilai guna ini sangat penting untuk memahami bagaimana ruang – ruang terbentuk, difungsikan, berfungsi, dan terpelihara sekalipun hal ini berada dalam tekanan urbanisasi dan kebijakan dari penataan kota.

Banyak program dari pemerintah seperti penataan ulang (*redvelopment*) kawasan kumuh tanpa mengamati dan memperhatikan nilai guna sosial-arsitektural yang sudah terbentuk. Alhasil proses relokasi tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat karena menghilangkan struktur, sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu kepada kajian Arsitektur untuk mengetahui bagaimana nilai guna yang sesungguhnya pada pemukiman kumuh Gampong Jawa Kota Banda Aceh agar dapat di tingkatkan dari sisi nilai guna (*use value*) yang sebenarnya menjadi nilai tukar (*exchange value*) dengan memperhatikan fungsi adaptif pada hunian, menilai fungsi, peran, dan manfaat ruang serta relasi sosial yang membentuk identitas kawasan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai guna permukiman kumuh Gampong Jawa terbentuk oleh karakteristik masyarakat dalam bertinggal?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ruang hunian mampu menghasilkan nilai guna serta nilai tukar bagi penghuninya, sesuai dengan kapasitas mereka dalam mengelola dan memanfaatkan ruang tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagai pendekatan karakteristik untuk memahami nilai guna (*use value*) dan nilai tukar hunian pada konteks permukiman kumuh serta memperkaya teori tentang perilaku bermukim Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya terkait adaptasi ruang, pemanfaatan ruang, dan strategi bertahan hidup dalam lingkungan terbatas.

Selain itu diharapkan juga memberikan gambaran nyata mengenai nilai guna permukiman kumuh bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program penataan kawasan kumuh di Banda Aceh serta menyediakan

informasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang hunian sesuai kemampuan mereka, sehingga intervensi perbaikan dapat lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan nilai guna dan menjadi bahan pertimbangan bagi arsitek dan perencana kota dalam merancang solusi perbaikan pemukiman kumuh yang responsif terhadap perilaku, kebutuhan, dan kapasitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

1.5. Batasan Penelitian

Batasan penelitian hanya meliputi ruang lingkup Dusun Tgk Muda Gampong Jawa Kota Banda Aceh yang berfokus pada aspek non fisik.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika ini disusun untuk memudahkan pemahaman bagi peneliti dan pembaca mengenai isi penelitian. Berikut adalah sistematika penelitian yang disusun oleh penulis.

A. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran singkat tentang latar belakang penelitian, masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika yang digunakan dalam penelitian ini

B. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan teori-teori yang relevan dengan penelitian serta kerangka penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam analisis.

C. Bab III Metode penelitian

Dalam bab ini, penulis menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk teknik pengumpulan data, cara pengambilan sampel, dan metode analisis data.

D. Bab IV Pembahasan dan Hasil

Bab ini menyajikan uraian mengenai objek penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan yang didasarkan pada hasil analisis tersebut.

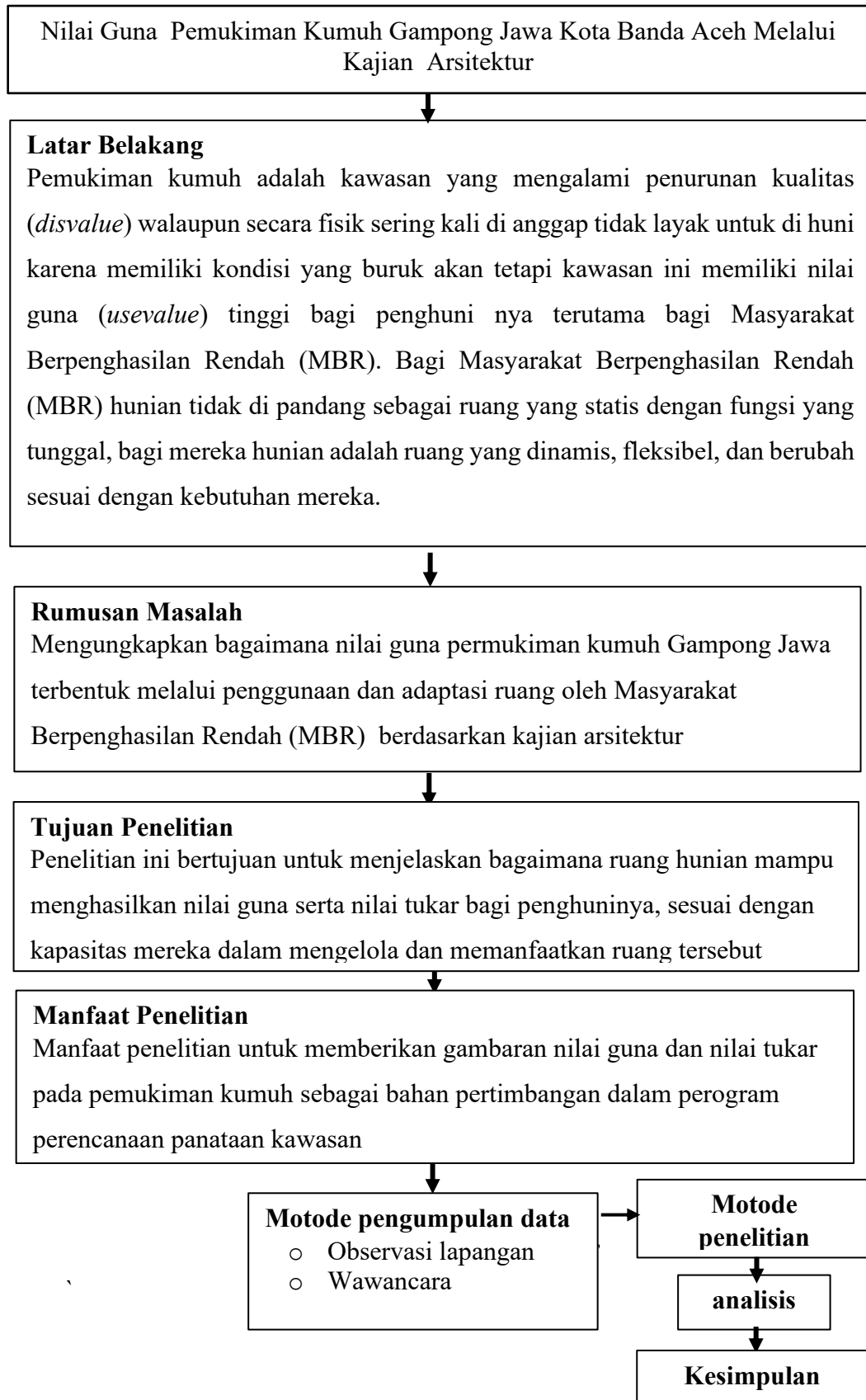
E. Bab V Penutup

Bab terakhir ini menyajikan ringkasan kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya dan juga mencakup saran - saran dari penulis untuk

pihak-pihak terkait, yang bertujuan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

1.7. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir didefinisikan sebagai pola atau alur penelitian yang berfungsi sebagai model untuk membangun hipotesis yang menghubungkan berbagai faktor yang dianggap sebagai masalah utama. Kerangka berpikir ini dapat dilihat pada gambar di halaman berikutnya.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian (analisis penulis, 2025)